

BAGIAN ANGGARAN 032



LAPORAN KEUANGAN

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2024**

*Jl. Swasembada Timur XIII No. 64, Tanjung Priok - Jakarta Utara
Telp.(021) 43910470,4371604, 43903634, Fax. (021) 43903634
bkipm.jakarta2@gmail.com*

BAGIAN ANGGARAN 032



LAPORAN KEUANGAN

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2024**

*Jl. Swasembada Timur XIII No. 64, Tanjung Priok - Jakarta Utara
Telp.(021) 43910470,4371604, 43903634, Fax. (021) 43903634
bkipm.jakarta2@gmail.com*

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kaidah-Kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Triwulan III ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada **Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II**. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta, 08 Oktober 2024
Plt. Kepala

Dedi Supardi, S.St.Pi
NIP. 19810509 200502 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	iv
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
II. NERACA	2
III. LAPORAN OPERASIONAL	3
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	4
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5
A. PENJELASAN UMUM	5
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	5
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
A.3. Basis Akuntansi	8
A.4. Dasar Pengukuran	8
A.5. Kebijakan Akuntansi	8
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	15
B.1. Pendapatan	16
B.2. Belanja	17
B.3. Belanja Pegawai	18
B.4. Belanja Barang	19
B.5. Belanja Modal	20
C. PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA	21
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	21
C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	21
C.3. Piutang Bukan Pajak	22
C.4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek	22
C.5. Piutang Bukan Pajak (Netto)	23
C.6. Persediaan	23
C.7. Tanah	24
C.8. Peralatan dan Mesin	24
C.9. Gedung dan Bangunan	25

C.10	Jalan, Irigasi, dan Jaringan.....	25
C.11	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	25
C.12	Aset Tak Berwujud	26
C.13	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	27
C.14	Utang kepada Pihak Ketiga.....	27
C.15	Utang Yang Belum Ditagihkan	27
C.16	Uang Muka dari KPPN	28
C.17	Utang Jangka Pendek Lainnya.....	29
C.18	Ekuitas	29
D.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	29
D.1	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	29
D.2	Beban Pegawai	30
D.3	Beban Persediaan.....	30
D.4	Beban Barang dan Jasa.....	30
D.5	Beban Pemeliharaan.....	31
D.6	Beban Perjalanan Dinas.....	31
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	32
D.8	Kegiatan Non Operasional	32
D.9	Pos Luar Biasa.....	33
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	33
E.1	Ekuitas Awal.....	33
E.2	Surplus (Defisit) LO	33
E.3	Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas.....	33
F.	PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	36
F.1	Kejadian - Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	36
F.2	Pengungkapan Lain - Lain	36
	LAMPIRAN	39

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Triwulan III Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan **Triwulan III Tahun Anggaran 2024** sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Jakarta, 08 Oktober 2024

Pt. Kepala

Dedi Supardi, S.St.Pi

NIP. 19810509 200502 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 30 September 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada **Tahun Anggaran 2024** adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp.6.674.802.034,-** atau mencapai **74,78 persen** dari estimasi pendapatan-LRA sebesar **Rp.8.926.450.000,-**. Sedangkan pada **Tahun Anggaran 2023** sebesar **Rp.7.904.943.826,-** atau mencapai **80,42 persen** dari estimasi pendapatan-LRA sebesar **Rp.9.829.845.000,-**.

Realisasi Belanja Negara pada **Tahun Anggaran 2024** adalah sebesar **Rp.6.072.998.467,-** atau mencapai **59,86 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp.10.144.737.000,-**. Sedangkan pada **Tahun Anggaran 2023** sebesar **Rp.10.883.246.971,-** atau mencapai **73,70 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp.14.766.375.000,-**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 30 September 2024.

Nilai Aset Per **30 September 2024** dicatat dan disajikan sebesar **Rp.21.872.687.957,-** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp.651.125.671,-** Aset Tetap (neto) sebesar **Rp.21.221.562.286,-**. Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp.277.695.218,-** ; dan Nilai Ekuitas **Rp.21.594.992.739,-**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan/LO, beban, Surplus/Defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus atau defisit/LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar **Rp.6.668.440.000,-** sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp.6.472.437.816,-** sehingga terdapat surplus dari kegiatan operasional senilai **Rp.196.002.184** kegiatan non operasional memiliki nilai surplus sebesar **Rp.4.362.034,-** dan pos-pos luar biasa memiliki nilai sebesar **Rp.0,-** sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar **Rp.200.364.218,-**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Ekuitas pada Tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar **Rp.21.911.600.963,-** dikurangi surplus-LO sebesar **Rp.200.364.218,-** kemudian ditambah lain-lain senilai **Rp.10.000,-** dikurangi transaksi antar entitas sebesar **Rp.(516.982.442),-**. Hasil penjumlahan defisit-LO, koreksi nilai aset non revaluasi, lain-lain dan transaksi antar entitas berupa penurunan ekuitas senilai **Rp.(316.608.224),-**, sehingga nilai dari ekuitas akhir pada Tanggal 30 September 2024 adalah senilai **Rp.21.594.992.739,-**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan Tanggal 30 September 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 30
SEPTEMBER 2023**

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran

(Dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA. 2024		% thd Anggaran	TA. 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.II.4	8,926,450,000	6,674,802,034	74.78	7,904,943,826
JUMLAH PENDAPATAN		8,926,450,000	6,674,802,034	74.78	7,904,943,826
B. BELANJA					
Belanja Pegawai	B.I.1	3,522,668,000	2,715,338,497	77.08	5,660,512,565
Belanja Barang	B.I.2	4,978,986,000	3,168,559,970	63.64	5,030,234,510
Belanja Modal	B.I.3	1,643,083,000	189,100,000	11.51	192,499,896
JUMLAH BELANJA		10,144,737,000	6,072,998,467	59.86	10,883,246,971

II. NERACA

BALAI KIPM JAKARTA II N E R A C A PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 30 SEPTEMBER 2023

Tabel 2 Neraca

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	65,000,000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	3,000	
Piutang Bukan Pajak	C.3		2,000,000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.4		(10,000)
- Piutang Bukan Pajak	C.5		1,990,000
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.6	586,122,671	412,602,767
Persediaan			
JUMLAH ASET LANCAR		651,125,671	414,592,767
ASET TETAP			
Tanah	C.7	10,118,066,000	10,118,066,000
Peralatan dan Mesin	C.8	16,403,346,851	16,359,346,851
Gedung dan Bangunan	C.9	10,358,049,540	10,358,049,540
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.10	316,816,000	316,816,000
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.11	(16,119,816,105)	(15,616,482,379)
JUMLAH ASET TETAP		21,221,562,286	21,535,796,012
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.12	349,800,000	349,800,000
AKUMULASI PENYUSUTAN / AMORTISASI ASET LAINNYA	C.13	(349,800,000)	(349,800,000)
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET KEWAJIBAN		21,872,687,957	21,950,388,779
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.14	211,638,688	38,787,816
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.15	1,053,530	
Uang Muka dari KPPN	C.16	65,000,000	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.17	3,000	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		277,695,218	38,787,816
JUMLAH KEWAJIBAN		277,695,218	38,787,816
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	21,594,992,739	21,911,600,963
JUMLAH EKUITAS		21,594,992,739	21,911,600,963
JUMLAH EKUITAS		21,594,992,739	21,911,600,963
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		21,872,687,957	21,950,388,779

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI KIPM JAKARTA II
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 30
SEPTEMBER 2023

Tabel 3 Laporan Operasional

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	6,668,440,000	7,797,195,000
JUMLAH PENDAPATAN		6,668,440,000	7,797,195,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2,805,727,185	5,892,357,523
Beban Persediaan	D.3	555,060,349	784,342,896
Beban Barang dan Jasa	D.4	2,049,091,533	2,784,644,109
Beban Pemeliharaan	D.5	246,948,343	746,205,540
Beban Perjalanan Dinas	D.6	312,483,121	835,655,399
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	503,333,726	697,642,648
JUMLAH BEBAN		6,472,644,257	11,740,848,115
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		195,795,743	(3,943,653,115)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	-	27,608,826
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	-	107,748,826
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	-	80,140,000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	4,362,034	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		4,362,034	27,608,826
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		200,157,777	(3,916,044,289)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		200,157,777	(3,913,044,289)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI KIPM JAKARTA II LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024 DAN 30 SEPTEMBER 2023

Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	21,911,600,963	23,210,524,862
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	200,364,218	(3,916,044,289)
KOREKSI YANG	E.3	10,000	968,000
MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Penyesuaian Nilai aset	E.4	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.5	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.6	-	968,000
Selisih Revaluasi Aset	E.7	-	-
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.8	-	-
LAIN-LAIN	E.9	10,000	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.10	(516,982,442)	3,082,449,145
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.11	(316,608,224)	(832,627,144)
EKUITAS AKHIR		21,594,992,739	22,377,897,718

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Dasar
Hukum
entitas dan
rencana
strategis*

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Balai Karantina Ikan Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan PMK 2005/PMK.011/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berkedudukan di Jalan Swasembada Timur XIII No.64 Tanjung Priok dan Jl. Enggano Raya No.16 Tanjung Priok, Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan fungsi utamanya melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar/wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu. Melalui peran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II diharapkan kualitas Laporan Keuangan dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia. Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya dilakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan. Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II berkomitmen dengan :

VISI:

“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

MISI :

“Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat tiga pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

TUJUAN :

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut ;
2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya;
3. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

1. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

SASARAN STRATEGIS :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Meningkatnya ketersediaan produk Kelautan dan Perikanan;
3. Meningkatnya hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan;
4. Terselenggaranya modernisasi sistem produksi Kelautan dan Perikanan, pengolahan dan pemasaran produk Kelautan dan Perikanan yang optimal dan bermutu;
5. Terselenggaranya pengendalian, pengawasan terkait dengan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta penegakan hukum di bidang karantina ikan;
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II yang kompeten dan profesional;
7. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II;
8. Terwujudnya *good governance & clean government* di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II;
9. Terkelolanya anggaran Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II secara optimal.

*Pendekatan
penyusunan
laporan
keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan untuk Periode 30 September Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai KIPM Jakarta II menerapkan basis akrual dalam Penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Basis Kas untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrua adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Basis Kas adalah Basis akuntansi yang mengakui adanya transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar Pengukuran yang diterapkan Kantor Balai Kipm Jakarta II dalam penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumberdaya Ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumberdaya ekonomi yang digunakan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standard Akutansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akutansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari *Satker* BALAI KIPM JAKARTA II Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan - kebijakan Akuntansi yang penting dan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan *Satker*. Balai KIPM JAKARTA II adalah sebagai berikut :

*Pendapatan
LRA*

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KasUmum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO Adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan di realisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
 - Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Akutansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode Pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban di akui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset
Lainnya*

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

Dana

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 5 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 sebagaimana diubah dengan PMK No.65/PMK.06/2017 tentang penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 266/KMK.6/2023 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut :

Tabel 6 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implentasi
akuntansi
berbasis
akrual
pertama
kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2010 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 September 2024 yang berbasis *cash to ward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2024 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, **Kantor BALAI KIPM JAKARTA II** telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah, penambahan dana APBNP dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7 perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan

URAIAN	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	8,873,710,000	8,873,710,000
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	52,740,000	52,740,000
Jumlah Pendapatan	8,926,450,000	8,926,450,000
Belanja		
Belanja Pegawai	7,837,283,000	7,837,283,000
Belanja Barang	6,830,533,000	6,830,533,000
Belanja Modal	2,747,000,000	2,747,000,000
Jumlah Belanja	17,414,816,000	17,414,816,000

Realisasi

Pendapatan

Negara dan Hibah

Rp.6.674.802.034,

-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada **30 September 2024** adalah sebesar **Rp.6.674.802.034,-** atau mencapai **74,78 persen** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp.8,926,450,000,-**. Keseluruhan Pendapatan Kantor BALAI KIPM JAKARTA II terdiri dari Pendapatan sensor/karantina, dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 8 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	8,873,710,000	6,654,220,000	74.99
2. Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	52,740,000	14,220,000	26.96
3. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	2,185,134	-
4. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	4,176,900	-
5. Pendapatan Anggaran Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	8,926,450,000	6,674,802,034	74.78

Realisasi Pendapatan Jasa (sensor/Karantina Ikan) TA.2024 mengalami penurunan sebesar 15,56% dibandingkan periode TA.2023. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pelayanan (Jasa) Karantina Ikan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor BALAI KIPM JAKARTA II. Terdapat adanya :

1. Realisasi Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya sebesar Rp.6.654.220.000,-.
2. Realisasi Pendapatan dari Penjualan Jasa Karantina Perikanan sebesar Rp.14.220.000,-.
3. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp.2.185.134,-. Hal ini disebabkan adanya pengembalian berupa belanja tunjangan fungsional/umum senilai Rp.185.134,- dan belanja tunjangan kinerja senilai Rp.2.000.000,- Balai KIPM Jakarta II.
4. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp.4.176.900,-. Hal ini disebabkan adanya pengembalian berupa pemeliharaan gedung Balai KIPM Jakarta II.

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA.2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 30 SEPT 2024	REALISASI 30 SEPT 2023	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	107,748,826	-100
2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	6,654,220,000	7,753,555,000	-14.18
3. Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	14,220,000	43,640,000	-67.42
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	2,185,134	-	-
5. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	4,176,900	-	-
6. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
7. Pendapatan Lain-Lain	-	-	-
Jumlah Pendapatan	6,674,802,034	7,904,943,826	-15.56

Realisasi Belanja
Negara
Rp.6.072.998.467,-

B.2. Belanja

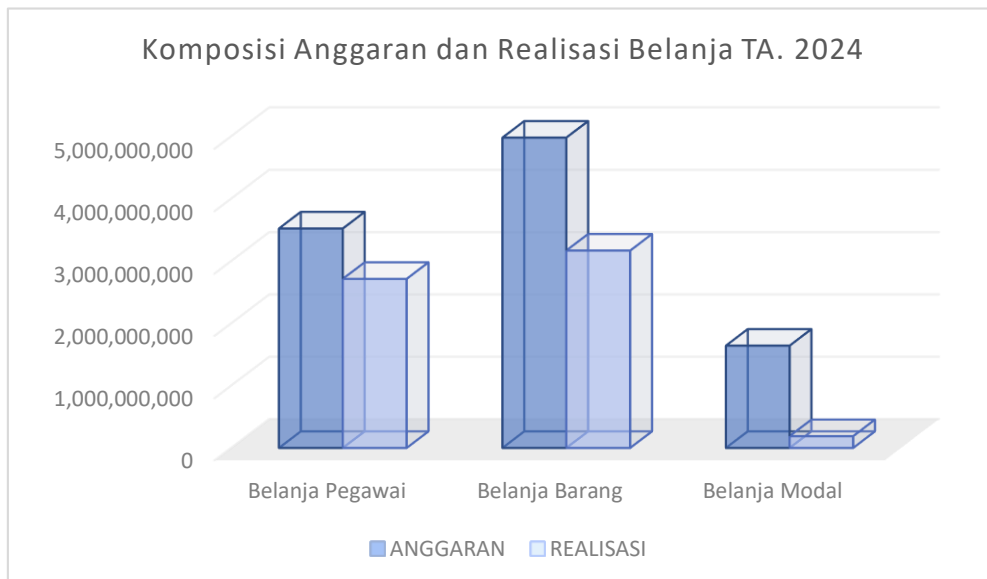
Realisasi Belanja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II pada **TA.2024** adalah sebesar **Rp.6.072.998.467,-** atau sebesar **59,86 persen** dari anggarannya sebelum dikurangi pengembalian belanja. Anggaran belanja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta II per **TA.2024** adalah sebesar **Rp.10.144.737.000,-**. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA.2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA.2024

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	3,522,668,000	2,715,339,030	77.08
Belanja Barang	4,978,986,000	3,168,979,970	63.65
Belanja Modal	1,643,083,000	189,100,000	11.51
Total Belanja Kotor	10.144.737.000	6.073.419.000	59.87
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pengembalian Belanja	-	420,533	-

Belanja Netto	10.144.737.000	6.072.998.467	53.86
----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Bagan 1 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2024

Dibandingkan dengan TA.2023, Realisasi Belanja Periode TA.2024 mengalami penurunan sebesar 44,20% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya pengurangan belanja pegawai dan belanja barang dikarenakan banyaknya pegawai yang pindah dari BPPMHKP ke BKI pada tahun 2024.

Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja TA.2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2,715,338,497	5,660,512,565	(52.03)
Belanja Barang	3,168,559,970	5,030,234,510	(37.01)
Belanja Modal	189,100,000	192,499,896	(1.77)
Jumlah Belanja	6,072,998,467	10,883,246,971	(44.20)

Belanja Pegawai
Rp.2.715.338.497,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai **TA.2024** dan **TA.2023** adalah masing-masing sebesar **Rp.2,715,338,497,-** dan **Rp.5,660,512,565,-**. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA.2024 dengan TA.2023 mengalami penurunan sebesar 52,03% dikarenakan adanya beberapa pegawai Balai KIPM Jakarta II yang pindah ke Badan Karantina Indonesia.

Tabel 12 Perbandingan Belanja Pegawai TA.2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,704,073,030	5,513,302,605	(50.95)
Belanja Lembur	11,266,000	147,210,000	(92.35)
Jumlah Belanja Kotor	2,715,339,030	5,660,512,605	(52.03)
Pengembalian Belanja Pegawai	-533	-40	1,232.50
Jumlah Belanja Bersih	2,715,338,497	5,660,512,565	(52.03)

Belanja Barang
Rp.3,168,559,970,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per **TA.2024** dan **TA.2023** adalah masing-masing sebesar **Rp.3,168,559,970,-** dan **Rp.5,030,234,510,-**. Realisasi Belanja Barang TA.2024 mengalami penurunan sebesar **37,01%** dari Realisasi Belanja Barang TA.2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya perpindahan anggaran kegiatan belanja barang dari Balai KIPM Jakarta II ke Badan Karantina Indonesia tahun 2024.

Tabel 13 Perbandingan Belanja Barang TA.2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	803,092,293	1,497,944,318	(46.39)
Belanja Barang Non Operasional	192,500,630	424,921,480	(54.70)
Belanja Barang Persediaan	642,678,157	885,971,595	(27.46)
Belanja Jasa	971,036,426	733,911,370	32.31
Belanja Pemeliharaan	246,769,343	685,982,281	(64.03)
Belanja Barang Konsumsi	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	312,903,121	802,558,466	(61.01)
Jumlah Belanja Kotor	3,168,979,970	5,031,289,510	(37.01)
Pengembalian Belanja	(420,000)	(1,055,000)	(60.19)
Jumlah Belanja Bersih	3,168,559,910	5,030,234,510	(37.01)

Belanja Modal
Rp.189,100,000,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA.2024 dan TA.2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.189.100.000,-** dan **Rp.192.499.896,-**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal periode TA.2024 mengalami penurunan sebesar 1,77% dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA.2023. Hal ini disebabkan antara lain adanya perpindahan anggaran kegiatan belanja modal dari Balai KIPM Jakarta II ke Badan Karantina Indonesia tahun 2024.

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA.2024 dan TA.2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189,100,000	192,499,896	(1.77)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	189,100,000	192,499,896	(1.77)
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	189,100,000	192,499,896	(1.77)

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp.189.100.000,-

B.5.1 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode TA.2024 dan periode TA.2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.189.100.000,-** dan **Rp.192.499.896,-** dan mengalami penurunan sebesar 1.77% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA.2023. Hal ini disebabkan karena perpindahan anggaran kegiatan belanja modal dari Balai KIPM Jakarta II ke Badan Karantina Indonesia tahun 2024.

Tabel 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA.2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Alat Bantu	-	-	-
Alat Ukur	-	-	-
Alat Kantor	44,000,000	-	100
Alat Rumah Tangga	-	-	-
Alat Studio	-	-	-
Peralatan Pemancar	-	-	-
Alat Kesehatan Umum	-	-	-

Unit Alat Laboratorium	89,600,000	-	-
Alat Laboratorium Fisika/Elektronika	-	-	-
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	-	-	-
Alat Khusus	-	-	-
Komputer Unit	55,500,000	182,600,000	(315)
Peralatan Komputer	-	9,899,896	-
Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	-
Alat Pengolahan	-	-	-
Alat Komunikasi	-	-	-
Pengembangan Mobil Pickup	-	-	-
Dst.....	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	189,100,000	192,499,896	(1.77)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	189,100,000	192,499,896	(1.77)

C. PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp.65.000.000,-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA.2024 dan TA.2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.65.000.000,-** dan **Rp.0,-** yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA.2024 dan 2023

Keterangan	TA. 2024	TA. 2023
Uang Tunai	65,000,000	-
Uang Muka	-	-
Kuitansi yang belum di SP2D kan	-	-
Jumlah	65,000,000	-

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp.3.000,-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal TA.2024 dan TA.2023 masing-masing sebesar **Rp.3.000,-** dan **Rp.0,-**. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	TA. 2024	TA. 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	-	-
Pajak PPh yang belum disetor	3,000	-
Honor kegiatan yang belum dibagikan	-	-
Pengembalian belanja belum disetor ke kas negara	-	-
Jumlah	3,000	-

Piutang Bukan Pajak
Rp.0,-

C.3 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNPB per Tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.2.000.000,-**. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Piutang Bukan Pajak TA.2024 dan 2023

Keterangan	TA. 2024	TA. 2023
Piutang Bukan Pajak	-	2,000,000
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	2,000,000

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp.0,-

C.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek TA. 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.10.000,-**. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-

Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
Jumlah	-	0%	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-

Piutang Bukan Pajak
Rp.0,-

C.5 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Saldo Piutang PNPB per Tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.1.900.000,-**. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Piutang Bukan Pajak TA.2024 dan 2023

Keterangan	TA. 2024	TA. 2023
Piutang Bukan Pajak	-	1,900,000
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	1,900,000

Persediaan
Rp.586.122.671,-

C.6 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 September 2024 dan 30 September 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp.586.122.671,-** dan **Rp.412.602.767,-**. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rincian Persediaan TA. 2024 dan 2023

Persediaan	30 Sept 2024	30 Sept 2023
Barang Konsumsi	268,978,323	349,350,419
Bahan untuk Pemeliharaan	-	139,000
Suku Cadang	4,402,658	4,442,658
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	-
Bahan Baku	312,741,690	58,670,690
Jumlah	586.122.671	412,602,767

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp.10.118.066.000,-

C.7 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor BALAI KIPM JAKARTA II per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah sebesar **Rp.10.118.066.000,-** dan **Rp. 10.118.066.000,-**. Mutasi tambah nilai tanah tersebut karena adanya koreksi pencatatan nilai oleh KPKNL dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Saldo Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	10.118.066.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 September 2024	10.118.066.000

Tabel 23 Rincian Tanah

Luas	Lokasi	Nilai
780 m2	Jl. Swasembada Timur XIII No.64, Tanjung Priok	10.118.066.000
Jumlah		10.118.066.000

Peralatan dan Mesin

Rp.16.548.446.851,-

C.8 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah **Rp.16.548.446.851,-** dan **Rp.16.359.346.851,-**. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Nilai
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Reklasifikasi Masuk	-
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 30 September 2024	16.359.346.851
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	-
Nilai Buku per 30 September 2024	16.359.346.851

Gedung dan
Bangunan
Rp.10.358.049.540,-

C.9 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 adalah **Rp.10.358.049.540,-** dan **Rp.10.358.049.540,-**. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Nilai
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 30 September 2024	10.358.049.540
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	-
Nilai Buku per 30 September 2024	10.358.049.540

Jalan, Jaringan dan
Irigasi
Rp.316.816.000,-

C.10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2023 dan per 30 September 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.316.816.000,-** dan **Rp.316.816.000,-**. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Rincian Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Nilai
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan tambah daya listrik	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 30 September 2024	316.816.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	-
Nilai Buku per 30 September 2024	316.816.000

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.(16.119.816.105,-)

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 adalah masing-masing **Rp.(16.119.816.105,-)** dan **Rp.(15.616.482.379,-)**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan

kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	16,548,446,851	14,672,319,877	1,876,126,974
Gedung dan Bangunan	10,358,049,540	1,379,383,010	8,978,666,530
Jalan, Irigasi dan Jaringan	316,816,000	68,113,218	248,702,782
Akumulasi Penyusutan	27,223,312,391	16,119,816,105	11,103,496,286

Aset Tak Berwujud
Rp.349.800.000,-

C.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 adalah **Rp.349.800.000,-** dan **Rp.349.800.000,-**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud Balai KIPM Jakarta II berupa software. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Nilai
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 September 2024	349.800.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	-349.800.000
Nilai Buku per 30 September 2024	0

Tabel 29 Rincian Aset Tak Berwujud

Uraian	Nilai
Software	349.800.000
Jumlah	349.800.000

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp.349.800.000,-

C.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 adalah masing-masing **Rp.349.800.000,-** dan **Rp.349.800.000,-**. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 30 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	349.800.000	349.800.000	-
Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah	349.800.000	349.800.000	-

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp.211.638.688,-

C.14 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 masing-masing sebesar **Rp.211.638.688,-** dan **Rp.38.787.816,-**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Balai KIPM Jakarta II per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	90,388,688	SPM Gaji Bulan Oktober 2024 yang belum terbit SP2D
Belanja barang yang masih harus dibayar	121,250,000	SPM Bahan Lab, Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor, Gaji PPNNP dan PJLP bulan Oktober 2024 yang belum terbit SP2D
Total	211,638,688	

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp.1.053.530,-

C.15 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 masing-masing sebesar **Rp.1.053.530,-** dan **Rp.0,-**.

Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan pada Kantor Balai KIPM Jakarta II per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	Jumlah
Pengadaan Bahan Laboratorium	
Listrik	
Telkom	
PAM	
Perpanjangan STNK	
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	
Pemeliharaan Printer dan Laptop/PC	
Keperluan Perkantoran	
Penambah Daya Tahan Tubuh	
Perjadin	
Persediaan Bahan Laboratorium	1,053,530
Belanja Bahan	
Pengiriman Pos	
Layanan Sampah	
Jumlah	1,053,530

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga. Pengakuan dan pencatatannya berdasarkan Dokumen BAST.

Uang Muka dari
KPPN
Rp.65.000.000,-

C.16 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 masing-masing sebesar **Rp.65.000.000,-** dan **Rp.0,-**. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Tabel 33 Rincian Uang Muka dari KPPN

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	65.000.000
Tambahan uang Persediaan	-
Jumlah	65.000.000

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp.3.000,-

C.17 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 masing-masing sebesar **Rp.3.000,-** dan **Rp.0,-**. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pajak yang belum disetorkan ke kas negara. Adapun rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Kantor Balai KIPM Jakarta II per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	Realisasi TA. 2024	Realisasi TA. 2023
Pajak yang belum disetor	3,000	-
Jumlah	3,000	-

Ekuitas
Rp.21.594.992.739,-

C.18 Ekuitas

Ekuitas per 30 September 2024 dan per 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.21.594.992.739,-** dan **Rp.21.911.600.963,-**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp.6.668.440.000

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan per 30 September 2023 adalah sebesar **Rp.6.668.440.000,-** dan **Rp.7.797.195.000,-**. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 34 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA. 2024 dan 2023

URAIAN	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	(100)
Pendapatan Pengujian Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	6,654,220,000	7,753,555,000	(14.18)
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	14,220,000	43,640,000	(67.42)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	-	-
Jumlah	6,668,440,000	7,797,195,000	(14.48)

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Pendapatan/Jasa Sensor Karantina Ikan.

Beban Pegawai
Rp.2.805.727.185,
-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada TA.2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.2.805.727.185,-** dan **Rp.5.892.357.523,-**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 35 Rincian Beban Pegawai TA. 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA. 2024	TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1,556,291,052	3,260,587,857	(52.27)
Beban Tunjangan-Tunjangan	1,238,170,666	2,484,559,706	(50.17)
Beban Lembur	11,266,000	147,210,000	(92.35)
Pengembalian Belanja	(533)	(40)	12.33
Jumlah	2,805,727,185	5,892,357,523	(52.38)

Beban Persediaan
Rp.555.060.349,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada TA.2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.555.060.349,-** dan **Rp.784.342.896,-**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang - barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA.2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Beban Persediaan TA. 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	449,546,349	642,056,667	(29.98)
Beban Bahan Baku	105,514,000	142,286,229	(25.84)
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	-
Bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	555,060,349	784,342,896	(63.10)

Beban Barang
dan Jasa
Rp.2.049.091.533,
-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA.2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.2.049.091.533,-** dan **Rp.2.784.644.109,-**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA.2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Beban Barang dan Jasa TA. 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	730,801,718	1,217,959,391	(40.00)
Beban Penambah Daya tahan tubuh	12,517,575	130,896,800	(90.44)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	47,000	198,500	(76.32)
Beban Honor Output Satuan Kerja	86,332,000	126,345,000	(31.67)
Beban Barang Operasional Lainnya	41,294,000	140,118,500	(70.53)
Beban Bahan	-	-	(52.11)
Beban Honor Output Kegiatan	91,956,630	400,813,480	(90.00)
Beban Barang Non Operasional lainnya	544,000	5,440,000	(100)
Beban Langganan Daya dan Jasa	-	4,500,000	(18.42)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	-	(89.29)
Beban Sewa	282,036,574	45,699,022	(55.47)
Beban Jasa Profesi	600,000	5,600,000	(46.29)
Beban Jasa Lainnya	37,261,318	83,680,514	(138)
Belanja Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	16,650,000	31,000,000	(100)
Jumlah	2,049,091,533	2,784,644,109	(26.41)

Beban

Pemeliharaan

Rp.246.948.343,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA.2024 dan TA.2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.246.948.343,-** dan **Rp.746.205.540,-**. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA.2024 dan TA.2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Pemeliharaan TA.2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81,569,995	317,029,826	(74.27)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165,199,348	379,694,554	(56.49)
Beban Pemeliharaan jaringan	-	-	-
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	139,000	16,305,000	(99.15)
Beban Persediaan Suku Cadang	40,000	33,176,160	(99.88)
Jumlah	246,948,343	746.205.540	(64.58)

Beban Perjalanan

Dinas

Rp.312.483.121,-

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA.2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.312.483.121,-** dan **Rp.835.655.399,-**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk TA.2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA.2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	175,910,742	308,161,187	(42.92)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	136,572,379	307,533,479	(55.59)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	7,130,000	(100)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	212,830,733	(100)
Jumlah	312,483,121	835,655,399	(62.61)

Beban

Penyusutan dan

Amortisasi

Rp.503.333.726,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA.2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.503.333.726,-** dan **Rp.697.642.648,-**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA.2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA.2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	381,314,713	531,898,635	(28.31)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	116,733,984	116,733,984	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	5,285,029	5,285,029	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	503,333,726	653,917,648	(23.03)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	43,725,000	(100)
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi		43,725,000	(100)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	503,333,726	697,642,648	(27.85)

Surplus /Defisit

dari Kegiatan Non

Operasional

Rp.4.362.034,-

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional TA.2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Kegiatan Non Operasional TA.2024 dan 2023

URAIAN	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	-	27,608,826	(100)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,362,034	-	-
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	4,362,034	27,608,826	(105.12)

Pos Luar Biasa
Rp.0,-

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk TA.2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TA.2024	TA.2023	NAIK (TURUN) %
Beban Luar Biasa	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.21.911.600.963,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.21.911.600.963,-** dan **Rp.23.210.524.862,-**.

Defisit LO
Rp.200.364.218,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada TA.2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp.200.364.218,-** dan **(Rp.3.916.044.289,-)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai
Aset Rp.0,-

E.3 Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp.0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk TA.2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Bahan Untuk Pemeliharaan	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-
Bahan Baku	-

Jumlah	-
--------	---

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp.0,-

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi yang dilakukan jika ditemukan kesalahan atau penilaian yang kurang tepat dalam reklasifikasi awal untuk melakukan pemindahan suatu akun. Nilai Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.968.000,-**.

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp.0,-

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah masing - masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp.0,-

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.0,-**. Nilai Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi tersebut adalah koreksi nilai Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan.

Tabel 43 Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain
Rp.10.000,-

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 2023 adalah sebesar **Rp.10.000,-** dan **Rp.0,-**. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 44 Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Pendapatan	10.000
Koreksi Beban	-
Koreksi Piutang	-

Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	10.000

Transaksi Antar
Entitas
(Rp.516.982.442,-)

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2024 dan 30 September 2023 adalah masing-masing sebesar **(Rp.516.982.442,-)** dan **Rp.3.082.449.145,-**. Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	2024	2023
Ditagihkan ke Entitas Lain	(6,072,998,467)	(10,883,246,971)
Diterima dari Entitas Lain	6,674,802,034	7,904,943,826
Transfer Keluar	-	-
Transfer Masuk	(84,821,125)	(104,146,000)
Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	-	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Setoran Surplus BLU	-	-
Jumlah	516,982,442	3,082,449,145

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Ditagihkan ke Entitas Lain/Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2024, DKEL sebesar **(Rp.6,072,998,467),-** sedangkan DDEL sebesar **Rp.6,674,802,034,-**.

E.4.2 Transfer Keluar/Transfer Masuk

Transfer Keluar/Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antar KL dengan BA-BUN. Transfer masuk merupakan perpindahan sertifikat KID sampai dengan 30 September 2024 sebesar **(Rp.84,821,125,-)** terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Barang Konsumsi	KID	22,799,000

Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Pita Cukai, Materai dan Leges	HC	62,022,125
Jumlah		84,821,125

Ekuitas Akhir

Rp.21.594.992.739,

-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada Tanggal 30 September 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.21.594.992.739,-** dan **Rp.22.377.897.718,-**.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. KEJADIAN - KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian-kejadian penting yang menyebabkan perubahan setelah tanggal neraca di laporkan.

F.2. PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN

Ada beberapa hal yang akan Balai KIPM Jakarta II ungkapkan, antara lain:

1. Terdapat SK Pengelola Anggaran dengan Nomor SK No.B.23/KPA/BKIPM.JKT.II/KU.110/III/2024 tanggal 01 Maret 2024.
2. Terdapat SK Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah (UAKPA/BARANG) dengan Nomor SK No.B.12/KPA/BKIPM.JKT.II/KU.110/II/2024 tanggal 15 Januari 2024.
3. Terdapat SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor SK No.B.14/KPA/BKIPM.JKT.II/KPA/KU.110/II/2024 tanggal 15 Januari 2024.
4. Terdapat SK Pengelola PNBP dengan Nomor SK No.B.13/KPA/BKIPM.JKT.II/KU.110/II/2024 tanggal 15 Januari 2024.
5. Terdapat Kas pada Bendahara Pengeluaran berupa uang persediaan (Bank) senilai Rp.65.000.000,-.
6. Terdapat Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) di Tahun Anggaran 2024 berupa Pengembalian Belanja Pegawai atas kelebihan pembayaran Tunjangan bagi PNS Tugas Belajar, Pengembalian Belanja Barang (Perjalanan Dinas) senilai Rp.858.000,- dan Pengembalian Belanja Barang (Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor) senilai Rp.3.318.900,-

7. Terdapat Aset Tak Berwujud senilai Rp.349.800.000,- berupa Aplikasi Penerbitan HC Eksport (Spectraline).
8. Utang kepada pihak ketiga senilai Rp.211.638.688,- berupa SPM Gaji Bulan Juli 2024 senilai Rp.90.388.688,- dan SPM Bahan Laboratorium, Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor, Gaji PPNPN dan PJLP bulan September 2024 senilai Rp.121.250.000,-. Utang yang belum ditagihkan senilai Rp.1.053.530,- berupa persediaan Bahan Lab yang belum dicairkan. Uang Muka dari KPPN senilai Rp.65.000.000,- berupa uang Persediaan RM dan PNBPN yang belum di SPM kan. Utang jangka pendek lainnya senilai Rp.3.000,- berupa pungutan pajak yang belum di setorkan bulan september dan sudah disetorkan bulan oktober untuk pembayaran pajak pemeliharaan laptop.
9. Adanya belanja modal yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pengadaan Laptop dan Personal Computer sebesar Rp.145.100.000, dengan SPK No.B.01.11/PPK/BKIPM.JKTII/PL.410/IX/2024 Tanggal 11 September 2024, SPM No.00251T tanggal 23 September 2024 dan SP2D No.241751302047579 tanggal 25 September 2024.
10. Adanya belanja modal yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pengadaan AC sebesar Rp.44.000.000, dengan Invoice No.23/SRM/KW/VIII/2024 Tanggal 13 Agustus 2024, SPM No.00217T tanggal 15 Agustus 2024 dan SP2D No. 241751301033740 tanggal 19 Agustus 2024.
11. Adanya belanja barang yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pengadaan barang laboratorium sebesar Rp.7.500.000,- sesuai Kwitansi No.KW/068/CONS/VII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 sesuai SPPNo.00216T tanggal 15 Agustus 2024.
12. Adanya belanja barang yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pengadaan barang laboratorium sebesar Rp.1.400.000,- sesuai Kwitansi No.KW/072/CONS/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sesuai SPP No.00224T tanggal 21 Agustus 2024.
13. Adanya belanja barang yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pembelian Cetakan Perkantoran sebesar Rp.49.990.000,- sesuai Kwitansi No.07/pmd/02.24 tanggal 07 Februari 2024 sesuai SPP No.00030T tanggal 13 Februari 2024.

14. Adanya belanja barang yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pembelian Cetakan Perkantoran sebesar Rp.31.650.000,- sesuai Kwitansi No.01/pmd/04.24 tanggal 01 April 2024 sesuai SPP No.00088T tanggal 01 April 2024.
15. Adanya belanja barang yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pembelian Cetakan Perkantoran sebesar Rp.49.800.000,- sesuai Kwitansi No.04/pmd/07.24 tanggal 05 Juli 2024 sesuai SPP No.00184T tanggal 15 Juli 2024.
16. Adanya belanja barang yang bersumber dari dana PNBPN berupa Pembelian Cetakan Perkantoran sebesar Rp.5.700.000,- sesuai Kwitansi No.024/pmd/0924 tanggal 24 September 2024 sesuai SPP No.00256T tanggal 25 September 2024.

LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II 649682

Tgl Data : 10/10/24 6:36 AM
Tgl Cetak : 10/10/24 1:26 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	8,926,450,000	6,674,802,034	(2,251,647,966)	75	9,829,845,000	7,904,943,826	1,924,901,174	80
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	8,926,450,000	6,674,802,034	(2,251,647,966)	75	9,829,845,000	7,904,943,826	1,924,901,174	80
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	8,926,450,000	6,674,802,034	(2,251,647,966)	75	9,829,845,000	7,904,943,826	1,924,901,174	80
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	10,144,737,000	6,072,998,467	(4,071,738,533)	60	14,766,375,000	10,883,246,971	3,883,128,029	74
1. Belanja Pegawai	3,522,668,000	2,715,338,497	(807,329,503)	77	7,632,726,000	5,660,512,565	1,972,213,435	74
2. Belanja Barang	4,978,986,000	3,168,559,970	(1,810,426,030)	64	6,602,414,000	5,030,234,510	1,572,179,490	76
3. Belanja Modal	1,643,083,000	189,100,000	(1,453,983,000)	12	531,235,000	192,499,896	338,735,104	36
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
ESELON I : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN 13
SATUAN KERJA : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II 649682

Tgl Data : 10/10/24 6:36 AM
Tgl Cetak : 10/10/24 1:26 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	10,144,737,000	6,072,998,467	(4,071,738,533)	60	14,766,375,000	10,883,246,971	3,883,128,029	74
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Jakarta, 10 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI
NIP. 198105092005021003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 649682
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
DKI JAKARTA
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 10/10/24 1:29 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 10/10/24 7:40 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,799,891,000	1,200,501,000	1,044,932,100	0	1,044,932,100	87.04	155,568,900
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	59,000	29,000	14,381	533	13,848	49.59	15,152
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	218,794,000	118,811,000	94,359,140	0	94,359,140	79.42	24,451,860
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	70,000,000	35,020,000	29,232,484	0	29,232,484	83.47	5,787,516
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	40,320,000	21,160,000	9,540,000	0	9,540,000	45.09	11,620,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	231,635,000	118,640,000	74,705,000	0	74,705,000	62.97	43,935,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,200,000	4,300,000	8,988,859	0	8,988,859	209.04	(4,688,859)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	180,874,000	83,427,000	66,626,400	0	66,626,400	79.86	16,800,600
511129	Belanja Uang Makan PNS	520,000,000	180,000,000	127,699,000	0	127,699,000	70.94	52,301,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,510,000	10,780,000	9,805,000	0	9,805,000	90.96	975,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	4,092,283,000	1,772,668,000	1,465,902,364	533	1,465,901,831	82.69	306,766,169
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	300,000,000	50,000,000	11,266,000	0	11,266,000	22.53	38,734,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	300,000,000	50,000,000	11,266,000	0	11,266,000	22.53	38,734,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,445,000,000	1,700,000,000	1,238,170,666	0	1,238,170,666	72.83	461,829,334
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	3,445,000,000	1,700,000,000	1,238,170,666	0	1,238,170,666	72.83	461,829,334
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	7,837,283,000	3,522,668,000	2,715,339,030	533	2,715,338,497	77.08	807,329,503
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,758,680,000	994,124,000	662,901,718	0	662,901,718	66.68	331,222,282
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	182,400,000	58,140,000	12,517,575	0	12,517,575	21.53	45,622,425
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	500,000	500,000	47,000	0	47,000	9.4	453,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	224,640,000	132,480,000	86,332,000	0	86,332,000	65.17	46,148,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	164,200,000	85,900,000	41,294,000	0	41,294,000	48.07	44,606,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,330,420,000	1,271,144,000	803,092,293	0	803,092,293	63.18	468,051,707
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	423,365,000	355,051,000	191,956,630	0	191,956,630	54.06	163,094,370
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	1,088,000	544,000	0	544,000	50	544,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	434,525,000	357,639,000	192,500,630	0	192,500,630	53.83	165,138,370
5218	Belanja Barang Persediaan							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 032
ESELON I : 13
WILAYAH/PROVINSI : 0100
SATUAN KERJA : 649682
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
DKI JAKARTA
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 10/10/24 1:29 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 10/10/24 7:40 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	460,624,000	376,508,000	272,584,157	0	272,584,157	72.4	103,923,843
521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	714,530,000	507,200,000	370,094,000	0	370,094,000	72.97	137,106,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,175,154,000	883,708,000	642,678,157	0	642,678,157	72.73	241,029,843
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	450,000,000	276,000,000	255,973,330	0	255,973,330	92.74	20,026,670
522112	Belanja Langganan Telepon	72,000,000	72,000,000	54,349,742	0	54,349,742	75.49	17,650,258
522113	Belanja Langganan Air	24,000,000	18,000,000	10,501,318	0	10,501,318	58.34	7,498,682
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	9,600,000	4,800,000	600,000	0	600,000	12.5	4,200,000
522141	Belanja Sewa	60,800,000	53,322,000	37,261,318	0	37,261,318	69.88	16,060,682
522151	Belanja Jasa Profesi	45,900,000	26,750,000	16,650,000	0	16,650,000	62.24	10,100,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	358,520,000	873,617,000	595,700,718	0	595,700,718	68.19	277,916,282
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,020,820,000	1,324,489,000	971,036,426	0	971,036,426	73.31	353,452,574
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	284,534,000	160,408,000	81,569,995	0	81,569,995	50.85	78,838,005
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	457,580,000	222,264,000	165,199,348	0	165,199,348	74.33	57,064,652
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	742,114,000	382,672,000	246,769,343	0	246,769,343	64.49	135,902,657
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	463,760,000	496,754,000	175,910,742	0	175,910,742	35.41	320,843,258
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	557,340,000	251,330,000	136,992,379	420,000	136,572,379	54.51	114,757,621
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	106,400,000	11,250,000	0	0	0	0	11,250,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,127,500,000	759,334,000	312,903,121	420,000	312,483,121	41.21	446,850,879
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	6,830,533,000	4,978,986,000	3,168,979,970	420,000	3,168,559,970	63.65	1,810,426,030
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,247,000,000	1,143,083,000	189,100,000	0	189,100,000	16.54	953,983,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,247,000,000	1,143,083,000	189,100,000	0	189,100,000	16.54	953,983,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	1,500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	1,500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,747,000,000	1,643,083,000	189,100,000	0	189,100,000	11.51	1,453,983,000
	JUMLAH BELANJA	17,414,816,000	10,144,737,000	6,073,419,000	420,533	6,072,998,467	59.87	4,071,738,533

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: 032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kode Lap : LRA.P.E1.1
ESELON I	: 13	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tanggal : 10/10/24 1:29 PM
WILAYAH/PROVINSI	: 0100	DKI JAKARTA	Halaman : 1
SATUAN KERJA	: 649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA	Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	8,873,710,000	6,654,220,000	0	6,654,220,000	74.99
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	8,873,710,000	6,654,220,000	0	6,654,220,000	74.99
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan					
425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	52,740,000	14,220,000	0	14,220,000	26.96
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4253	52,740,000	14,220,000	0	14,220,000	26.96
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,185,134	0	2,185,134	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,176,900	0	4,176,900	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	6,362,034	0	6,362,034	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	8,926,450,000	6,674,802,034	0	6,674,802,034	74.78
	JUMLAH PENDAPATAN	8,926,450,000	6,674,802,034	0	6,674,802,034	74.78

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 10/10/24 12:23 PM

Tgl Cetak : 10/10/24 1:26 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	65,000,000	0	65,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,000	0	3,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	0	2,000,000	(2,000,000)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(10,000)	10,000	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	1,990,000	(1,990,000)	(100.00)
Persediaan	586,122,671	412,602,767	173,519,904	42.05
JUMLAH ASET LANCAR	651,125,671	414,592,767	236,532,904	57.05
ASET TETAP				
Tanah	10,118,066,000	10,118,066,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	16,548,446,851	16,359,346,851	189,100,000	1.16
Gedung dan Bangunan	10,358,049,540	10,358,049,540	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	316,816,000	316,816,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(16,119,816,105)	(15,616,482,379)	(503,333,726)	3.22
JUMLAH ASET TETAP	21,221,562,286	21,535,796,012	(314,233,726)	(1.46)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	349,800,000	349,800,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(349,800,000)	(349,800,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	21,872,687,957	21,950,388,779	(77,700,822)	(0.35)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	211,638,688	38,787,816	172,850,872	445.63
Utang Yang Belum Ditagihkan	1,053,530	0	1,053,530	0.00
Uang Muka dari KPPN	65,000,000	0	65,000,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	3,000	0	3,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	277,695,218	38,787,816	238,907,402	615.93
JUMLAH KEWAJIBAN	277,695,218	38,787,816	238,907,402	615.93
EKUITAS				
Ekuitas	21,594,992,739	21,911,600,963	(316,608,224)	(1.44)
JUMLAH EKUITAS	21,594,992,739	21,911,600,963	(316,608,224)	(1.44)
JUMLAH EKUITAS	21,594,992,739	21,911,600,963	(316,608,224)	(1.44)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	21,872,687,957	21,950,388,779	(77,700,822)	(0.35)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 10/10/24 12:23 PM

Tgl Cetak : 10/10/24 1:26 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Jakarta, 10 Oktober 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI
NIP. 198105092005021003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 10/10/24 6:36 AM

Tgl Cetak : 10/10/24 1:26 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	65,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	3,000	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	268,978,323	0
0.0	117114	Suku Cadang	4,402,658	0
0.0	117131	Bahan Baku	312,741,690	0
0.0	131111	Tanah	10,118,066,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	16,548,446,851	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	10,358,049,540	0
0.0	134113	Jaringan	316,816,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	14,672,319,877
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,379,383,010
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	68,113,218
0.0	162151	Software	349,800,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	349,800,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	90,388,688
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	121,250,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	1,053,530
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	65,000,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	3,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	6,072,998,467
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	6,674,802,034	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	84,821,125
0.0	391111	Ekuitas	0	21,911,600,963
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	10,000
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	6,654,220,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	14,220,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	185,134
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,176,900
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,115,771,900	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	14,777	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	101,071,010	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	31,391,028	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	10,080,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	79,155,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	9,044,104	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	71,333,700	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	127,699,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II
Tgl Data : 10/10/24 6:36 AM
Tgl Cetak : 10/10/24 1:26 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10,730,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	11,266,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,238,170,666	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	730,801,718	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	12,517,575	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	47,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	86,332,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	41,294,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	191,956,630	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	544,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	223,243,695	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	48,291,561	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	10,501,318	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	600,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	37,261,318	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	16,650,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	649,050,718	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81,569,995	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165,199,348	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	175,910,742	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	136,572,379	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	381,314,713	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	116,733,984	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	5,285,029	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	449,339,908	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	139,000	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	40,000	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	105,514,000	0
JUMLAH			51,489,543,912	51,489,543,912

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE
Jakarta, 10 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI
NIP. 198105092005021003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 10/10/24 12:23 PM

Tgl Cetak : 10/10/24 1:27 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	6,072,998,467
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	6,674,802,034	0
3.0	425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	6,654,220,000
3.0	425332	Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	14,220,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,185,134
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,176,900
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,044,932,100	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,381	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	94,359,140	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	29,232,484	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	9,540,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	74,705,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	8,988,859	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	66,626,400	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	127,699,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	9,805,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	11,266,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,238,170,666	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	662,901,718	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	12,517,575	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	47,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	86,332,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	41,294,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	191,956,630	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	544,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	272,584,157	0
3.0	521821	Belanja Barang Persediaan bahan baku	370,094,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	255,973,330	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	54,349,742	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	10,501,318	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	600,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	37,261,318	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	16,650,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	595,700,718	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	81,569,995	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165,199,348	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	175,910,742	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 10/10/24 12:23 PM
Tgl Cetak : 10/10/24 1:27 PM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	136,992,379	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189,100,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	533
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	420,000
JUMLAH			12,748,221,034	12,748,221,034

Keterangan :
BELUM FINAL
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Jakarta, 10 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI
198105092005021003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 25/10/24 6:41 AM

Tgl Cetak : 25/10/24 10:01 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	6,668,440,000	7,797,195,000	(1,128,755,000)	(14.476)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	6,668,440,000	7,797,195,000	(1,128,755,000)	(14.476)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	6,668,440,000	7,797,195,000	(1,128,755,000)	(14.476)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,805,727,185	5,892,357,523	(3,086,630,338)	(52.384)
Beban Persediaan	555,060,349	784,342,896	(229,282,547)	(29.232)
Beban Barang dan Jasa	2,049,091,533	2,784,644,109	(735,552,576)	(26.415)
Beban Pemeliharaan	246,948,343	746,205,540	(499,257,197)	(66.906)
Beban Perjalanan Dinas	312,483,121	835,655,399	(523,172,278)	(62.606)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 25/10/24 6:41 AM

Tgl Cetak : 25/10/24 10:01 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	503,333,726	697,642,648	(194,308,922)	(27.852)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	6,472,644,257	11,740,848,115	(5,268,203,858)	(44.871)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	195,795,743	(3,943,653,115)	4,139,448,858	(104.965)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	27,608,826	(27,608,826)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	107,748,826	(107,748,826)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	80,140,000	(80,140,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,362,034	0	4,362,034	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,362,034	0	4,362,034	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4,362,034	27,608,826	(23,246,792)	(84.201)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	200,157,777	(3,916,044,289)	4,116,202,066	(105.111)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	200,157,777	(3,916,044,289)	4,116,202,066	(105.111)

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 25 Oktober 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI
NIP. 198105092005021003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (649682) BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II

Tgl Data : 10/10/24 12:23 PM
Tgl Cetak : 10/10/24 1:26 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	21,911,600,963	23,210,524,862	(1,298,923,899)	(5.6)
SURPLUS/DEFISIT-LO	200,364,218	(3,916,044,289)	4,116,408,507	(105.12)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	10,000	968,000	(958,000)	(98.97)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	968,000	(968,000)	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	10,000	0	10,000	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(516,982,442)	3,082,449,145	(3,599,431,587)	(116.77)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(316,608,224)	(832,627,144)	516,018,920	(61.97)
EKUITAS AKHIR	21,594,992,739	22,377,897,718	(782,904,979)	(3.5)

Keterangan : Jakarta, 10 Oktober 2024
BELUM FINAL Penanggung Jawab UAKPA
*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE Kuasa Pengguna Anggaran

DEDI SUPARDI
NIP. 198105092005021003